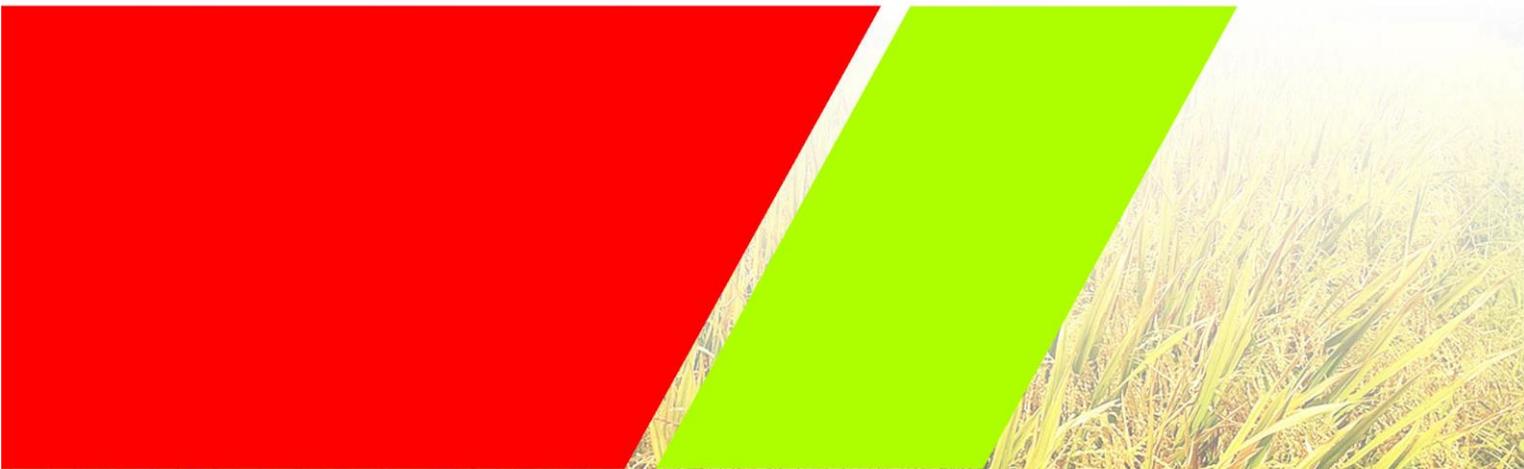


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026



**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA SINGKAWANG**

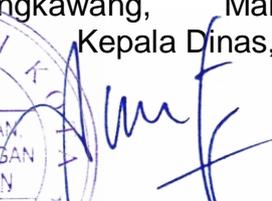
Jalan Achmad Yani No. 73 Singkawang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023-2026 dapat disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang pangan, Pertanian dan Perikanan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipandang perlu untuk menyusun/menetapkan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026 yang merupakan acuan dan tolak ukur utama bagi berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan dibidang pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Singkawang dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Singkawang, Maret 2022
Kepala Dinas,


DWI YANTI, S.T. M.T
NIP. 19780224 200312 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Aparatur	26
2.3. Sumber Daya Anggaran	27
2.4. Sarana dan Prasarana	27
2.5. Kinerja Pelayanan	28
2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	47
3.2. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga	51
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	56
3.4. Isu-isu Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1. Tujuan	60
4.2. Sasaran	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	101
BAB VIII PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Menurut Golongan	26
Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Menurut Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Tahun 2018-2021	27
Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset atau Barang Milik Daerah	28
Tabel 2.5	Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2021	29
Tabel 2.6	Aspek Pelayanan Umum Bidang Pangan Tahun 2017-2021	39
Tabel 2.7	Analisis FVSA Tahun 2021 Berdasarkan Komposit	39
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Tahun 2018-2021	42
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang berdasarkan Analisis Renstra Kementerian Pertanian	53
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Kota Singkawang berdasarkan Analisis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	55
Tabel 4.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 2023-2026	64
Tabel 6.1	Program, Kegiatan serta indikasi Pendanaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	79
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.....	25
Gambar 2.2	Perkembangan Produksi Padi Tahun 2018-2021	30
Gambar 2.3	Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2018-2021	31
Gambar 2.4	Perkembangan Produksi Ubi Kayu Tahun 2018-2021	32
Gambar 2.5	Perkembangan Produksi Ubi Jalar Tahun 2018-2021	32
Gambar 2.6	Perkembangan Produksi Nenas dan Rambutan Tahun 2018-2021	33
Gambar 2.7	Perkembangan Produksi Karet Tahun 2018-2021	34
Gambar 2.8	Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2018-2021	35
Gambar 2.9	Perkembangan Produksi Kelapa Dalam Tahun 2018-2021	35
Gambar 2.10	Perkembangan Produksi Daging Tahun 2018-2021	36
Gambar 2.11	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2021	37
Gambar 2.12	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2021	38
Gambar 2.13	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) 2023-2026 sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2023-2026. Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Serta Penyusunan Resntra Perangkat Darerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka perangkat daerah menyusun langkah-langkah strategis dan sasaran prioritas sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya perangkat daerah serta menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD).

1.2. Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra Tahun 2023 -2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

- Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah Dengan Masa JabatanKepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaSingkawang Tahun 2018-2022

(Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 62);

38. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan Perikanan;
39. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan pangan dan Perikanan;
40. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/489/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang;
41. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang ini adalah untuk :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Unit Kerja Dinas dalam menentukan Kebijakan dan prioritas Program dan Kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang dan dibiayai dari APBD dan Sumber pembiayaan lainnya, sehingga diperoleh perencanaan yang terpadu;

- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah serta memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai;

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- b. Menjadi Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
- c. Membangun partisipasi stakeholder Kota Singkawang dalam perencanaan pembangunan
- d. sektor Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumberdaya Aparatur

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia , asset dan unit usaha operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang pada lima tahun mendatang.

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pada pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaah Renstra K/L

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, Kementerian lembaga, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3. Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang ditinjau dari Gambaran pelayanan; Sasaran Jangka menengah Renstra K/L.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

4.2. Sasaran

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

VI. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

VIII. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, maka Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian, pangan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian, pangan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- c. penetapan program kerja di bidang pertanian, pangan dan perikanan;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pertanian, pembinaan peternakan dan kesehatan hewan, pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan serta pembinaan perikanan;
- f. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan dan perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas (a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan (b). Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan

kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bidang Pertanian tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian meliputi lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang lahan,

- irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan, pengembangan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan bina usaha; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan meliputi ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan. Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan tangkap,

- perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan, pemasaran dan pengawasan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

UPT adalah unsure pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- b. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- d. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- e. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama / pengangkatan dari jabatan

2.2 Sumberdaya Aparatur

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	6	2	-	10
3	Bidang Pertanian	1	6	-	-	7
4	Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan	2	6	-	-	8
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	6	-	-	6
6	Bidang Perikanan	-	7	2	-	9
7	UPT Puskesmas	1	1	-	-	2
8	UPT Rumah Potong Hewan	-	2	2	-	4
9	Fungsional Penyuluh Pertanian	5	17	1	-	23
Jumlah		12	51	7	-	70

Jumlah Pegawai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	1	3	-	-	10
3	Bidang Pertanian	1	5	-	1	-	-	7
4	Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan	2	5	1	-	-	-	8
5	Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1	5	-	-	-	-	6
6	Bidang Perikanan	-	5	2	2	-	-	9
7	UPT Puskesmas	1	1	-	-	-	-	2
8	UPT Rumah Potong Hewan	1	1	-	2	-	-	4
9	Fungsional Penyuluh Pertanian	2	19	1	1	-	-	23
Jumlah		10	46	5	9	-	-	70

2.3 Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Tahun 2018-2021

No	Uraian	Pagu				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan					
	Belanja Tidak Langsung	7.261.597.655	7.517.002.481	7.596.921.559	20.886.853.561	14.224.324.894
	Belanja Lansung	12.851.216.880	14.570.356.250	10.210.195.790		
	TOTAL	20.112.814.535	22.087.358.731	17.807.117.349	20.886.853.561	14.224.324.894

2.4 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singjkawang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kerja, baik berupa barang tidak bergerak (gedung/kantor, ruang pertemuan, garasi, komputer, audio visual, perlengkapan internet, brankas, dan lain-lain) dan barang bergerak (sarana mobilitas/kendaraan).

Rekap asset/ Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset/ Barang Milik Daerah

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Volume	Satuan	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	Tanah	31	Item	4.115.593.871.01	4.115.593.871.01
2	Aset Peralatan dan Mesin	1767	Item	35.415.146.622	1.096.012.085
3	Aset Gedung dan Bangunan	146	Item	65.330.953.398	43.108.281.223
4	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	50	Item	1.325.289.180	605.233.432
5	Aset Tidak Berwujud	0	Item	NIHIL	NIHIL
6	Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	110	Item	31.070.115.912	17.407.393.697

2.5 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mendukung Kinerja dari Wali Kota. Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Pangan ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 2018-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah	Produksi Tanaman Pangan (ton)											
		- Padi	10.118	12.308,92	12.493,55	12.493,55	12.743,42	10.648,42	12.308,92	13.807,34	12.488,87		
		- Jagung	2.267	2.372	2.408	2.408	2.079	536	2.372,00	1.449,00	1.702,13		
		- Ubi kayu	887	1.108	1.108	1.108	1.108	1.350	1.108,00	765	1.578,92		
		- Ubi Jalar	317	285	285	285	285	344	285,00	348,6	951,29		
		Produksi Tanaman Hortikultura (ton)											
		- Nenas	n/a	6.238	6.550	6.877	7.221	5.508	2.917,80	2,00	1.403,60		
		- Rambutan	n/a	2.918	3.064	3.217	3.378	2.409	6.238,10	2.213,00	104,20		
		Produksi Tanaman Perkebunan(ton)											
		- Karet	5.382	5.628	4.717	4.949	5.067	5.388	5.628	4.756	4.791		
		- Kelapa Sawit	7.044	4.786	4.689	4.807	4.901	7.061	4.786	4.846	4.978		
		- Kelapa Dalam	1.512	1.581	1.489	1.533	1.563	1.525	1.581	1.507	1.581		
		Produksi Daging (ton)		11.755,54	9.404,35	10.815	12.978	10.285,88	9.443,71	5.716,95	4.943,82		
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.343,87	4.213,51	4.329,38	4.450,60	4.539,62	1.670,00	4.286,20	3.355,05	3.676,89				
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.234,73	1.996,00	2.058,00	2.118,00	2.181,00	2.019,37	1.910,20	1.713,11	1.973,52				
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	1.737	2.078	2.058	2.078	2.099	2.058	1.965	2.051	1.716		
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB	-	-	-	BB		
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	BB	BB	-	-	BB	-		

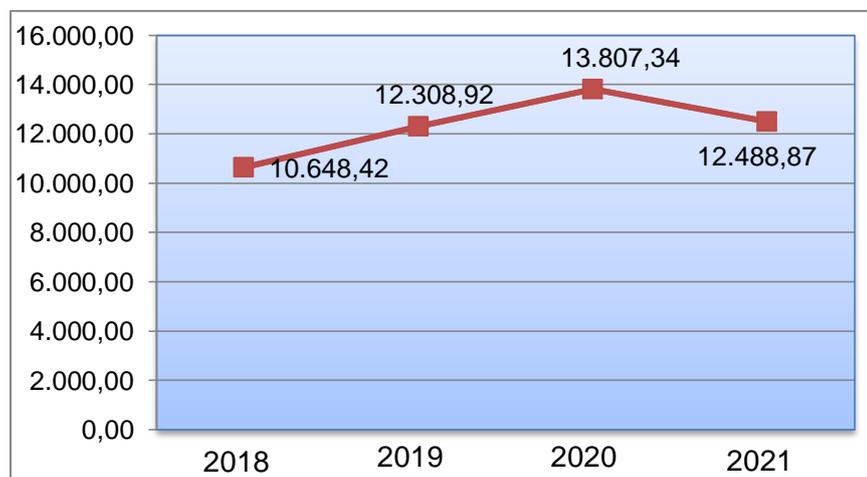
a. Urusan Pertanian

➤ Produksi Tanaman Pangan (ton)

Indikator yang diukur adalah produksi dari Komoditi Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

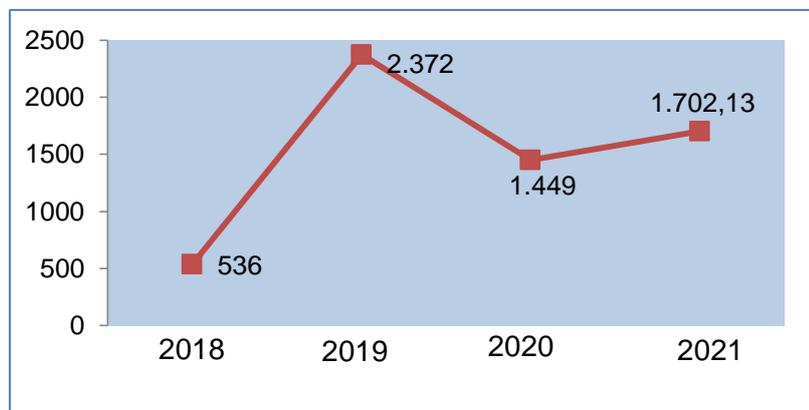
- Produksi Padi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan terutama disebabkan Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, penerapan teknik budidaya padi yang masih cenderung konvensional, terobosan baru dalam teknik budidaya padi belum optimal terlaksana. Serta adanya penurunan luas panen sebesar 5,84% dari tahun 2020. Selain itu terdapat beberapa factor yang mempengaruhi produksi padi yaitu penerapan teknik budidaya, perbenihan, perlindungan tanaman pangan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Perbenihan tanaman pangan terkait dengan produksi, ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang secara langsung berkaitan dengan produksi pertanian.

Gambar 2.2 Perkembangan Produksi Padi Tahun 2018-2021



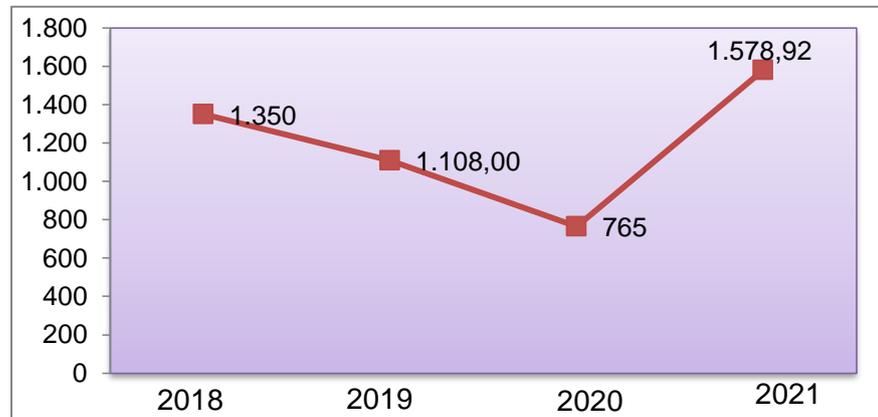
- Produksi Jagung tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.372 ton, tetapi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasinya masih dibawah target. Produksi terendah terjadi pada tahun 2018, rendahnya produksi ini disebabkan adanya penurunan luas tanam jagung. Realisasi angka sementara produksi tanaman Jagung tahun 2021 sebesar 1.702,13 ton jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan produksi. Kenaikan ini disebabkan adanya bantuan bibit jagung baik yang berasal dari Kementerian Pertanian maupun dari Dinas Provinsi.

Gambar 2.3 Perkembangan Produksi Jagung Tahun 2018-2021



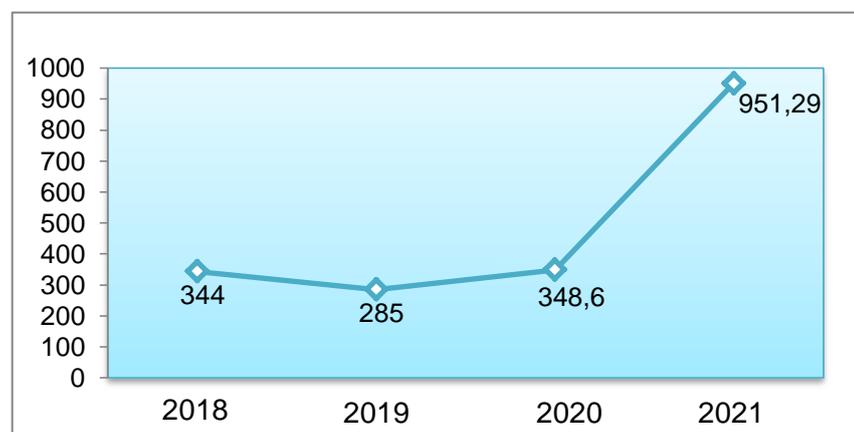
- Produksi Ubi Kayu pada tahun 2021 menjadi produksi tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2019, 2020. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada indicator sasaran, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 765 ton. Penurunan ini disebabkan rendahnya minat petani dalam membudidayakan komoditi ubi

Gambar 2.4 Perkembangan Produksi Ubi Kayu Tahun 2018-2021



- Produksi ubi jalar terjadi kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan realisasi angka sementara produksi tanaman Ubi Jalar tahun 2021 sebesar 951,29 ton jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan. Sama halnya dengan komoditi ubi kayu dan ubi jalar juga kurang mendapatkan dukungan kebijakan program/kegiatan dan anggaran dari pemerintah, dan lebih utama merupakan pertanaman swadaya petani sehingga tidak ada intervensi kegiatan pemerintah untuk peningkatan produksinya.

Gambar 2.5 Perkembangan Produksi Ubi Jalar Tahun 2018-2021



➤ **Produksi Tanaman Hortikultura**

Indikator yang diukur adalah produksi dari Komoditi nenas dan rambutan.

- Produksi nenas tertinggi pada tahun 2018 sebesar 5.508 ton.
- Produksi rambutan tertinggi tahun 2019, dimana ditahun tersebut terjadi panen raya. Komoditi rambutan dapat menjadi komoditi unggulan kota singkawang, karena rambutan yang terdapat dikota singkawang memiliki rasa yang manis dan mempunyai tekstur isi yang tebal. Dalam dua (2) tahun terakhir terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh tingginya tingkat curah hujan, yang berakibat pada proses pembungaan. komoditi nenas dan rambutan juga kurang mendapatkan dukungan kebijakan program/kegiatan dan anggaran dari pemerintah, dan lebih utama merupakan pertanaman swadaya petani sehingga tidak ada intervensi kegiatan pemerintah untuk peningkatan produksinya.

Gambar 2.6
Perkembangan Produksi Nenas dan Rambutan Tahun 2018-2021

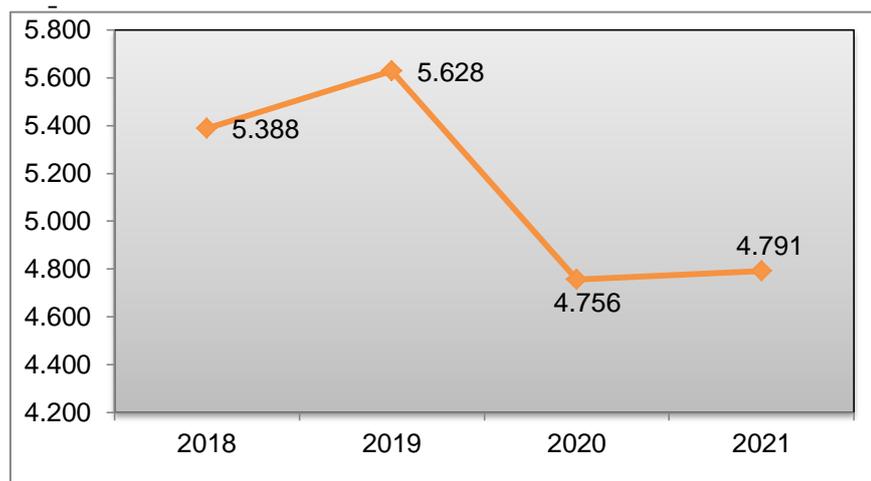


➤ Produksi Tanaman Perkebunan

Indikator yang diukur adalah produksi dari Komoditi Karet, Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam.

- Produksi Karet dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Realisasi angka sementara produksi Komoditi Karet tahun 2021 sebesar 4.791 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,74. Kenaikan ini disebabkan adanya pemupukan yang berimbang serta pengendalian organisme pengganggu yang baik. Terjadinya penurunan produksi dari tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh alih fungsi lahan baik itu untuk pembangunan maupun berubah menjadi lahan pertanian dan adanya tanaman yang sudah tidak reproduktif.

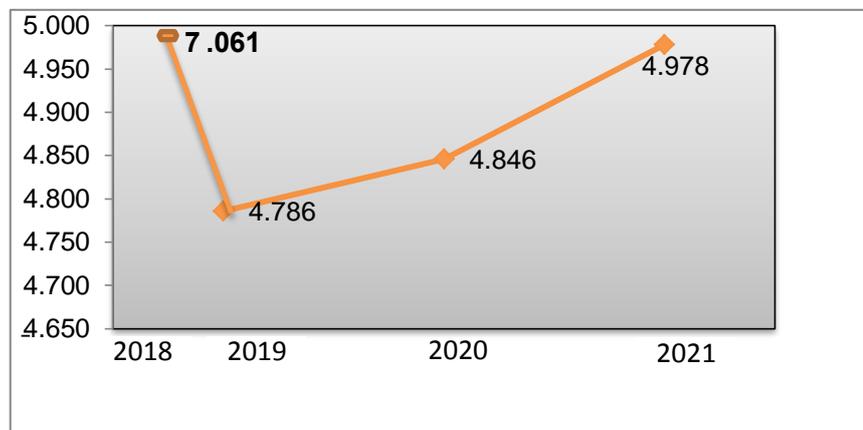
Gambar 2.7
Perkembangan Produksi Komoditi Karet Tahun 2018-2021



- Produksi Kelapa Sawit tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 7.061 ton, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat

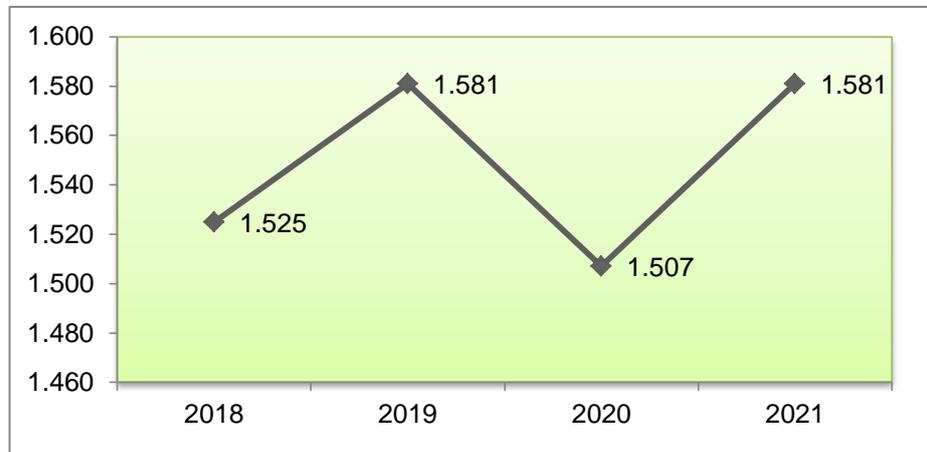
signifikan. Penurunan yang sangat ini di sebabkan oleh berkurangnya luas tanam kelapa sawit sekitar 1.969 ha serta adanya adanya tanaman yang sudah tidak refrodukstif.

Gambar 2.8 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2018-2021



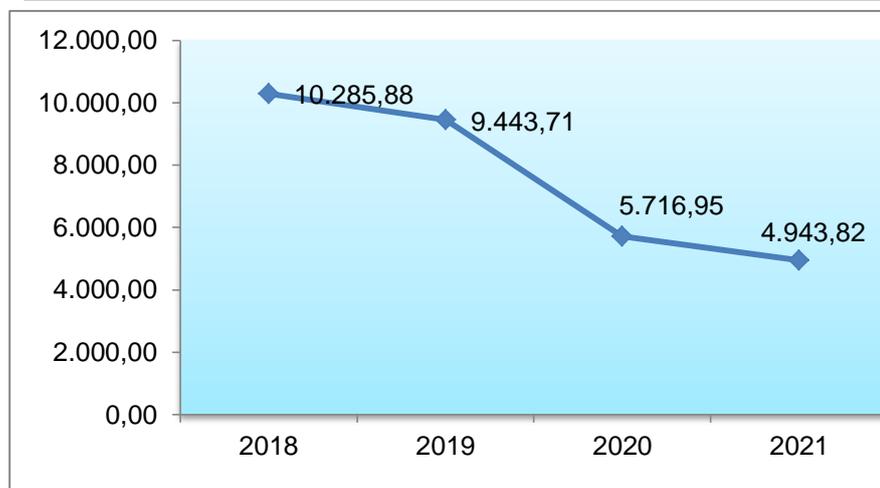
- Produksi Kelapa Dalam terjadi kenaikan dan penurunan pada tiap-tiap tahunnya, tetapi tidak terlalu signifikan. Realisasi angka sementara produksi Komoditi Kelapa Dalam tahun 2021 sebesar 1.581 ton jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,68%. Peningkatan ini disebabkan karena petani melakukan pemeliharaan dan perawatan serta pemupukan yang berimbang pada kebun kelapanya.

Gambar 2.9 Perkembangan Produksi Kelapa Dalam Tahun 2018-2021



- Produksi Daging mengalami penurunan setiap tahunnya. Realisasi angka sementara produksi daging tahun 2021 sebesar 4.943,82 ton jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang sangat besar. Pada tahun 2021 Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi daging ayam kampung yang sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh harga yang relatif tinggi sehingga daya beli terhadap produk tersebut rendah. Tantangan terhadap peningkatan produksi daging ini yaitu munculnya Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis.

Gambar 2.10 Perkembangan Produksi Daging Tahun 2018-2021



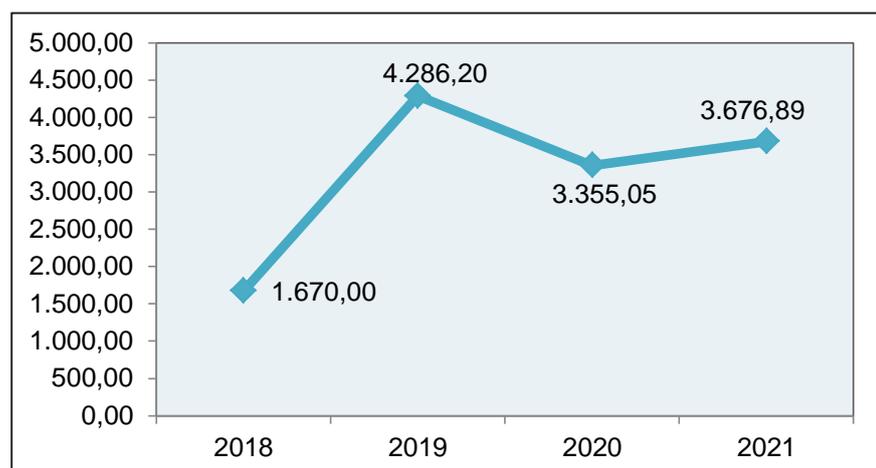
b. Urusan Perikanan

Pada urusan perikanan yang menjadi indikator kinerja dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu Produksi Perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya.

➤ Produksi Perikanan Tangkap

Pada table 1 dapat dilihat jumlah produksi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2019 menjadi tahun didengan produksi tertinggi di bandingkan dengan tiga (3) tahun lainnya. Ada beberapa factor yang menyebabkan rendahnya realisasi produksi perikanan tangkap salah satunya produksi tangkap sangat bergantung terhadap perubahan iklim, dimana pada dibeberapa tahun perubahan cuaca ekstrem sering terjadi diperairan Indonesia

Gambar 2.11 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018-2021

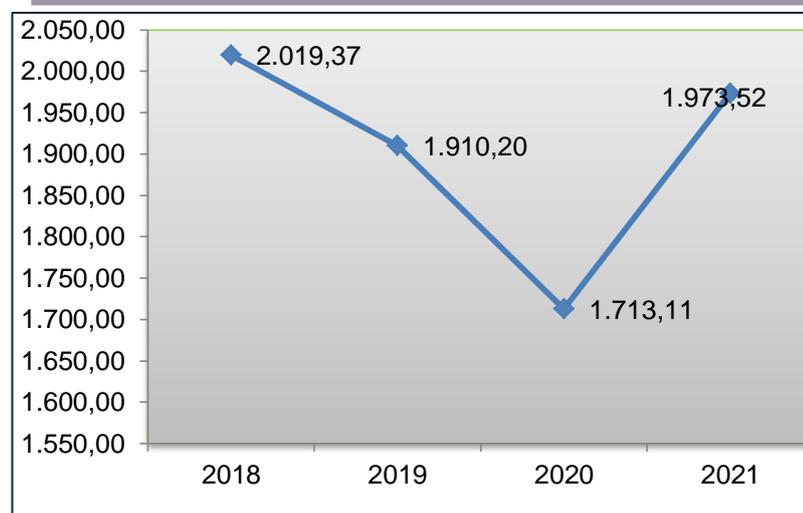


➤ Produksi Perikanan Budidaya

Jika dilihat dari tabel 1 dapat dilihat perkembangan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu 2018

sampai dengan 2021. Produksi pada tahun 2018 sebesar 2.019,37 ton dan mengalami penurunan produksi sampai tahun 2021. Pada tahun 2021 memang terjadi peningkatan produksi dari tahun 2020 sebesar 15,20%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya pada tahun 2018, realisasi produksi perikanan tangkap melebihi dari target. Permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya ikan antara lainnya adalah harga pakan ikan yang tinggi sehingga berdampak pada berkurangnya populasi ikan yang dibudidayakan oleh pembudidaya.

Gambar 2.12 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2021



c. **Urusan Pangan**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pangan salah satunya ditunjukkan dengan angka ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menggambarkan ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh penduduk

(per kapita) pada suatu daerah dalam satu tahun. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, pada tahun 2021 ketersediaan pangan utama Kota Singkawang sebesar 450.15 kg/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2021 jumlah ketersediaan pangan utama yang dapat dikonsumsi setiap penduduk Kota Singkawang dalam satu tahun sebanyak 450.15kg.

Tabel. 2.6
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan
Kota Singkawang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)
1.	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	320,56	222,73	375,63	435,48	450.15
2.	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	1.336	1.185	1.438	1.747	2.144
3.	Ketersediaan protein (gram/kap/hari)	50,83	50,60	63,70	90,89	72.88

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, pemetaan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan sangat perlu diukur dengan pendekatan wilayah melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Maka situasi ketahanan dan kerentanan pangan kota singkawang Tahun 2021 dari berdasarkan indek komposit.

Tabel 2.7
Analisis FSVA Tahun 2021 Berdasarkan Komposit

No	Kecamatan	Kelurahan	Prioritas Komposit
1	Singkawang Selatan	Sedau	4
		Sijangkung	3
		Pangmilang	3
		Sagatani	1
2	Singkawang Timur	Pajintan	4
		Sanggau Kulor	2
		Bagak Sahwa	5
		Nyarumkkop	2
		Mayasopa	1
3	Singkawang Utara	Sei Garam Hilir	6
		Naram	4
		Sei Bulan	4
		Sei Rasau	3
		Setapuk Kecil	4
		Setapuk Besar	2
		Semelagi Kecil	3
4	Singkawang Barat	Pasiran	6
		Melayu	6
		Tengah	6
		Kuala	3
5	Singkawang Tengah	Roban	3
		Condong	6
		Sekip Lama	5
		Jawa	5
		Bukit Batu	3
		Sei Wie	3

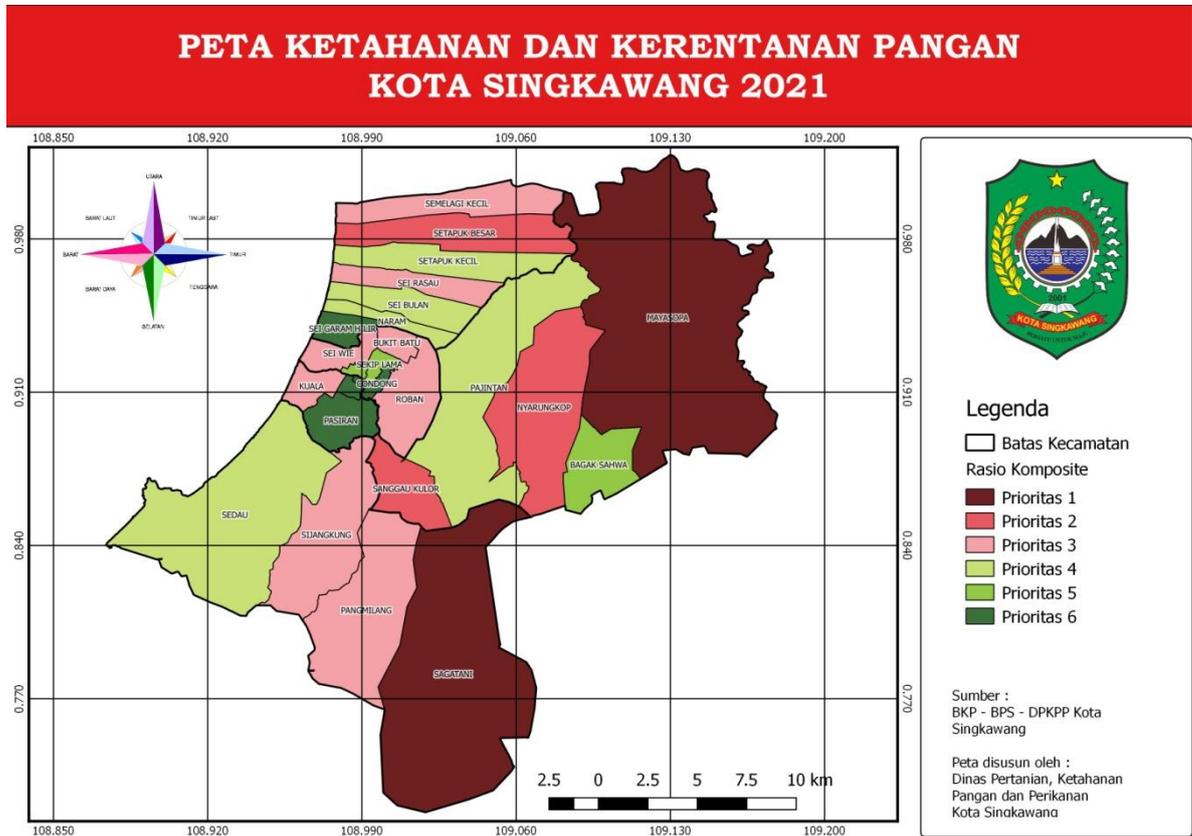
Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Hasil Analisis FSVA, 2021

Keterangan :

Uraian	Keterangan
1	Sangat Rentan
2	Rentan
3	Agak Rentan
4	Agak Tahan
5	Tahan
6	Sangat Tahan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 26 kelurahan yang ada di Kota Singkawang maka didapatkan 2 kelurahan yaitu Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Mayasopa (Prioritas 1), 3 kelurahan yaitu Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Nyarumkop (Prioritas 2), 8 kelurahan yaitu Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Kuala, Kelurahan Roban, Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Sekip Lama (Prioritas 3), 5 kelurahan yaitu Kelurahan Pajintan, Kelurahan Sedau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Naram (Prioritas 4), 3 kelurahan yaitu Kelurahan Sekip Lama, Kelurahan Jawa dan Kelurahan Bagak Sahwa (Prioritas 5) dan 5 kelurahan yaitu Kelurahan Pasiran, Kelurahan Melayu, Kelurahan Condong, Kelurahan Sungai Garam dan Kelurahan Tengah (Prioritas 6).

Gambar 2.13
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit



Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2021

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Administrasi	2.303.259.755	2.737.977.700	1.984.284.250		2.024.039.149	2.404.169.844	1.835.032.410		87,88	87,81	92,48	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.940.000	318.600.000	300.978.000		338.856.780	289.858.022	280.740.100		84,73	90,98	93,28	
Peningkatan Disiplin Aparatur	52.000.000	46.750.000	-		44.081.664	44.330.000	-		84,77	94,82	-	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.398.400	52.343.200	56.128.200		29.602.400	39.524.400	56.095.200		97,38	75,51	99,94	
Penguatan Transparansi Publik	23.000.000	43.200.000	-		21.500.000	33.000.000	-		93,48	76,39	-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	145.652.025	355.721.000	62.824.000		108.421.577	345.147.650	60.772.500		74,44	97,03	96,73	
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	235.422.000	133.162.000	930.000		206.013.000	115.994.500	930.000		87,51	87,11	100	
Pengembangan Budidaya Perikanan	1.792.359.600	1.425.324.250	1.068.370.750		1.657.001.736	1.400.097.150	1.051.976.400		92,45	98,23	98,47	
Pengembangan Perikanan Tangkap	2.831.484.000	2.800.380.500	2.284.570.350		2.558.650.675	2.669.809.847	2.271.051.470		90,36	95,34	99,41	
Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	455.727.500	113.985.000	294.642.150		400.482.425	97.499.000	274.143.000		87,88	85,54	93,04	

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Kesejahteraan Petani	111.950.000	18.640.000	3.015.000		103.759.000	18.640.000	3.015.000		92,68	100	100	
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	26.730.000	45.500.000	61.630.000		26.730.000	45.500.000	61.630.000		100	100	100	
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	8.110.200	8.300.000	-		6.630.000	8.300.000	-		81,75	100	-	
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	2.534.898.300	3.883.062.000	2.809.721.500		2.353.157.600	3.232.497.563	2.796.228.000		92,83	83,25	99,52	
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	287.310.000	312.210.600	120.074.100		270.335.800	306.573.970	120.073.100		94,09	98,19	100	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1.032.745.100	1.259.256.000	857.952.490		993.471.500	1.225.070.904	842.584.621		96,20	97,29	98,21	
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	335.730.000	955.594.000	212.375.000	-	321.805.800	838.441.200	208.611.000		95,85	87,74	98,23	
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Produksi Peternakan	244.500.000	60.350.000	92.700.000	-	240.012.000	60.237.000	91.165.080		98,16	99,81	98,34	

RENCANA STRATEGIS | **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | **2026**

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	-	-	-	703.268.700	-	-	-	686.176.700	-	-	-	97,57
Pengawasan Keamanan pangan	-	-	-	15.997.800	-	-	-	15.297.800	-	-	-	95,62
Pengelolaan Perikanan tangkap	-	-	-	3.472.217.071	-	-	-	3.439.312.920	-	-	-	99,05
Pengelolaan Perikanan budidaya	-	-	-	843.219.017	-	-	-	823.318.237	-	-	-	97,64
Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan	-	-	-	585.311.050	-	-	-	583.115.800	-	-	-	99,62
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	10.554.885.700	-	-	-	9.710.706.450	-	-	-	92,00
Penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian	-	-	-	1.182.563.916	-	-	-	1.123.569.960	-	-	-	95,01
Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	-	-	-	2.119.122.056	-	-	-	2.113.896.835	-	-	-	99,75
Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	348.712.038	-	-	-	321.632.770	-	-	-	92,23
Program Pengendalian dan Penanggulangan	-	-	-	798.780.454	-	-	-	796.990.954	-	-	-	99,78

RENCANA STRATEGIS **2023**
 DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

Bencana pertanian												
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Penyuluhan Pertanian	-	-	-	262.775.759	-	-	-	257.553.449	-	-	-	98,01

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD dalam empat tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Tantangan :

- Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
- Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
- Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
- Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha sehingga hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
- Ketergantungan masyarakat pada satu jenis pangan pokok yaitu beras
- Masih lemahnya adopsi teknologi di bidang pangan, pertanian dan perikanan

b. Peluang

- Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat mesin pertanian
- Penganekaragaman konsumsi pangan dapat diartikan sebagai penyediaan alternatif sumber pangan
- Mendorong masyarakat untuk mampu menyediakan pangan keluarganya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti pemanfaatan pekarangan untuk pangan.

- Berkembangnya komoditi unggulan
- Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan melalui Program-program pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang adalah untuk mewujudkan kondisi pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
URUSAN PANGAN			
1.	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
			Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
			Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
		Belum optimalnya penganekaragan dan keamanan	Belum optimalnya promosi keanekaragaman bahan olahan pangan lokal

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

		pangan lokal	kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
			Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
			Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
URUSAN PERIKANAN			
2	Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Kapasitas produksi BBI Belum optimal
			Kapasitas produksi dari UPR Belum optimal
		Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	Pabrik pakan skala rumah Tangga belum berkembang dengan baik
			Kenaikan harga ikan tidak Seimbang dengan kenaikan harga pakan
		Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan

			menjadi besar
			Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas
		Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha Perikanan budidaya terbatas	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi Pembudidaya skala kecil
		Akses pemasaran terbatas	Masih rendahnya angka Konsumsi ikan
			Daya saing produk olahan Ikan masih relatif rendah
		Adanya penurunan kualitas sumberdaya perairan budidaya	Ikan lebih mudah terkena penyakit
URUSAN PERTANIAN			
3	Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya Produksi hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
			Belum optimalnya peran Kelembagaan petani
			Semakin menurunnya jumlah petani
			Ketersediaan

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

			<p>sarana prasarana Pertanian yang masih kurang</p> <p>Belum optimalnya fasilitas hasil pertanian</p>
4	Belum optimalnya produksi, ternak, dan daya saing produk hasil ternak	Keterbatasan ketersediaan bibit Ternak unggul	Keterbatasan jumlah sarana Prasarana Inseminasi Buatan
		Keterbatasan ketersediaan pakan ternak	<p>Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan Dengan tanaman pangan</p> <p>Belum optimalnya ketersediaan pakan</p>
		Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
		Tingginya risiko kerugian usaha akibat kematian ternak	Munculnya penyakit hewan Menular strategis (PHMS)
	Masih tingginya harapan masyarakat (kelompok tani ternak) terhadap fasilitas	Tingkat permodalan kelompok tani ternak menjadi kendala untuk berkembang	Belum maksimalnya exploitasi potensi yang ada dikelompok serta sasaran fasilitas

	Pemerintah	sehingga kurang bisa bersaing secara kompetitif	oleh pemerintah harus tepat dan sesuai dengan harapan kelompok tani ternak
	Pengawasan PAH ASUH belum maksimal	Masih adanya pemotongan hewan diluar RPh	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAH ASUH

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi dari Kementerian Pertanian adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Pertanian mengemban misi yang harus dilaksanakan. Misi Kemeterian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan,
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bias diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang berdasarkan Analisis Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum optimalnya produksi Tanaman Pangan	Adanya alih fungsi lahan	Penerapan teknologi inovatif dalam sistem budidaya dan pendekatan

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				indeks pertanaman (IP Padi)
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Rendahnya Daya saing komoditas pertanian	Rendahnya kualitas hasil pertanian	Adanya komoditas unggulan daerah
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Belum terjaminnya keamanan dan mutu pangan	Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Melaksanakan uji sampel terhadap pangan segar asal hewan
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian	Kurangnya kualitas SDM Pertanian	Pelatihan yang terintegrasi, kajian teknologi dan SL (sekolah lapang) serta Demplot Percontohan
5	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Belum optimalnya infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian	Penyediaan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian belum sesuai dengan karakteristik wilayah	Adanya pemetaan wilayah sesuai dengan kebutuhan prasarana dan sarana pertanian
6	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta	Adanya perubahan iklim yang ekstrim sehingga menimbulkan serangan OPT yang luas serta munculnya	Terbatasnya petugas POPT dan Petugas Paramedik Hewan	Mengoptimalkan kinerja penyuluh, POPT dan peran aktif dari UPT PUSKESWAN

No	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penyakit pada hewan	penyakit hewan strategis		
7	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Semakin terbatasnya sumberdaya manusia serta kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian	Menurunnya minat generasi muda pada bidang pertanian	Adanya pelatihan-pelatihan yang berbasis agribisnis

2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengemban misi yang harus dilaksanakan. Misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan

d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Untuk mencapai visi dan misi, kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sasaran strategis yaitu :

- Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- Tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Kota Singkawang berdasarkan Analisis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Masih rendahnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Masih rendahnya SDM masyarakat kelautan dan perikanan	Pelatihan /apresiasi nilai tambah perikanan dan bantuan sarana produksi, sarana pengolahan dan pemasaran
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Masih rendahnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Daya saing produk perikanan masih relatif rendah	Pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Belum optimalnya Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Kurangnya daya dukung terhadap Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Dukungan dari stake holder dalam rangka menjaga Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Masih rendahnya kapasitas kompetensi SDM kelautan dan perikanan	Kurangnya kemampuan untuk melakukan kegiatan Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan	Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk kegiatan Bimtek dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

No	Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	belum optimalnya pelaksanaan hasil riset dan inovasi	Kurangnya penerapan teknologi	Peningkatan SDM Perikanan
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Industrialisasi kelautan dan perikanan masih bersifat tradisional dan berskala mikro	Kurangnya akses permodalan	Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan Industrialisasi kelautan dan perikanan
7	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengawasan kelautan dan perikanan	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas Petugas Pengawasan	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kota Singkawang 2021-2041, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang salah satunya adalah Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik

diwilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan. Sesuai dengan RTRW Kota Singkawang.

a. Kawasan pertanian terdiri atas :

- 1) Kawasan tanaman pangan, dengan luasan kurang lebih dengan luas kurang lebih 10.995 ha (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Setapak Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
 - b) Kelurahan Bukit Batu, Kelurahan Roban, dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan,
 - d) Kelurahan Sanggau Kulor, Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Bagak Sahwa, dan Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan
 - e) Kelurahan Pasiran di Kecamatan Singkawang Barat.
- 2) Kawasan hortikultura, dengan luasan kurang lebih 702 ha (tujuh ratus dua hektare) tersebar di seluruh Kota Singkawang:
 - a) Kelurahan Mayasopa di Kecamatan Singkawang Timur, dan

- b) Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan
- 3) Kawasan perkebunan, dengan luasan kurang lebih 9.819 ha (sembilan ribu delapan ratus sembilan belas hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Mayasopa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Sanggau Kulor, dan Kelurahan Pajintan di Kecamatan Singkawang Timur,
 - b) Kelurahan Semelagi Kecil, Kelurahan Setapuk Besar, Kelurahan Setapuk Kecil, Kelurahan Sungai Rasau, Kelurahan Sungai Bulan, Kelurahan Naram, dan Kelurahan Sungai Garam Hilir di Kecamatan Singkawang Utara,
 - c) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang, dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan, dan
 - d) Kelurahan Roban dan Kelurahan Sungai Wie di Kecamatan Singkawang Tengah
- 4) Kawasan peternakan, dengan luasan kurang lebih 2.266 ha (dua ribu dua ratus enam puluh enam hektare), terdapat di:
 - a) Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara,
 - b) Kelurahan Roban di Kecamatan Singkawang Tengah,
 - c) Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Sanggau Kulor di Kecamatan Singkawang Timur, dan

- d) Kelurahan Sedau, Kelurahan Sijangkung, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani di Kecamatan Singkawang Selatan.
- b. Kawasan perikanan, terdiri dari:
 - 1) Kawasan perikanan tangkap, dengan luasan kurang lebih 62 ha (enam puluh dua hektare) terdapat di Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah.
 - 2) Kawasan perikanan budi daya, dengan luasan kurang lebih 53 ha (lima puluh tiga hektare) terdapat di Kelurahan Setapak Besar, Kelurahan Sungai Rasau, dan Kelurahan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara.

3.3 Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Singkawang masih dihadapkan pada beberapa isu strategis yaitu :

1. Masih rendahnya pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, peternakan perikanan, perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana
2. Belum optimalnya penganekaragaman konsumsi pangan karena kurang Ketersediaan pangan yang beragam
3. Upaya peningkatan produksi pertanian masih rentan terhadap pencemaran dan kerusakan karena belum optimalnya penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan
4. Masih adanya daerah rawan pangan
5. Munculnya penyakit hewan Menular strategis yang dapat mempengaruhi usaha peternakan
6. Kurangnya kegiatan hilirisasi produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan

7. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Bab IV memuat rumusan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026. Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator :

- a. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
- b. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

4.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang. Rumusan sasaran dari tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konsumsi Energi dan Protein dalam mengoptimalkan Diversifikasi Pangan Masyarakat

Indikator dari sasaran ini adalah :

- a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)

2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian daerah

Indikator dari sasaran ini adalah :

- a. Produksi Tanaman Pangan
 - Produksi Padi (ton)
 - Produksi Jagung (ton)
 - Produksi Talas (ton)
- b. Produksi Buah-buahan (ton)
- c. Produksi Sayuran (ton)
- d. Produksi Perkebunan
 - Produksi Kelapa Sawit (ton)
 - Produksi Karet (ton)
 - Produksi Kelapa Dalam (ton)
- e. Produksi Daging (ton)
- f. Produksi Perikanan Tangkap (ton)
- g. Produksi Perikanan Budidaya (ton)

Untuk memudahkan melakukan pengukuran atas capaian sasaran Perangkat Daerah, maka Indikator dan Target capaian tahun 2023-2026 dirumuskan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
I	Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	81,6	83,9	85,0	86,1	87,2	87,2
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	4,34	4,42	4.46	4,50	4,54	4,54
		Meningkatnya Konsumsi Energi dalam mengoptimalkan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.072	2.082	2.087	2.092	2.097	2.097
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Daerah	Produksi Tanaman Pangan :						
			Produksi Padi (ton)	14.770,45	15.067	15.217	15.369	15.522	15.522
			Produksi Jagung (ton)	2.466	2.565	2.616	2.668	2.721	2.721
			Produksi Talas	1.888	1.964	2.003	2.043	2.084	2.084

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
					(ton)				
			Produksi Buah-buahan (ton)	2.899	3.016	3.076	3.137	3.200	3.200
			Produksi Sayur-sayuran (ton)	2.201	2.289	2.335	2.382	2.430	2.430
			Produksi Perkebunan :						
			Produksi Kelapa Sawit (ton)	4.978	5.226	5.488	5.762	6.050	6.050
			Produksi Karet (ton)	4.791	5.039	5.290	5.554	5.831	5.831
			Produksi Kelapa Dalam (ton)	1.518	1.563	1.610	1.658	1.708	1.708
			Produksi Daging (ton)	5.205,39	5.361,55	5.522,39	5.743,28	6.030,44	6.030,44
			Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.450,6	4.630,4	4.723	4.817,5	4.913,8	4.913,8
			Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.973	2.147,9	2.190,9	2.234,7	2.279,4	2.279,4

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Renstra merupakan rumusan permasalahan komperhensif tentang bagaimana Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah sistematis dalam tujuan dan sasaran melalui program-program prioritas indikatif. Rumusan strategi tersebut selanjutnya akan menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun 2023-2026.

Berikut ini disajikan tabel yang mengemukakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Energi dalam mengoptimalkan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Diversifikasi pangan berkelanjutan
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap	Peningkatan produksi, kualitas produksi pertanian dan Perikanan	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan Perikanan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

2023
2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Perekonomian daerah		Penerapan teknologi inovatif dalam sistem budidaya dan pendekatan indeks pertanaman (IP Padi)
				Penerapan teknologi inovatif didalam sistem budidaya
				Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pertanian dan Perikanan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang tahun 2023-2026 merupakan rangkaian upaya yang dilakukan dalam mendukung program pembangunan daerah Kota Singkawang. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 1.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1.4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 1.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.4.4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Pengadaan Mebel
 - 1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.1.1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1.1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- 2.1.1.2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- 2.1.1.3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- 2.1.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- 2.1.1.5. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

2.2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 2.2.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- 2.2.1.2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- 2.2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- 2.2.1.4. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

- 2.2.1.5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- 2.2.1.6. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 2.2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**
 - 2.2.2.1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2.2.2.2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**
 - 2.2.3.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 2.2.3.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
- 2.3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**
 - 2.3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
 - 2.3.1.1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2.3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - 2.3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - 2.3.2.2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada

Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

2.4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- 2.4.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 2.4.1.2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.4.1.3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
- 2.4.1.4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 2.4.1.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

3.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- 3.1.1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- 3.1.1.2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

3.1.2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.2.1. Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil
- 3.1.2.2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan /Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- 3.1.3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 3.1.3.1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - 3.1.3.2. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
 - 3.1.3.3. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
- 3.1.4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**
 - 3.1.4.1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 3.1.4.2. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- 3.2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
 - 3.2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian**
 - 3.2.1.1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B

- 3.2.1.2. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B
- 3.2.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 3.2.1.4. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

3.2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian

- 3.2.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- 3.2.2.2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Embung Pertanian
- 3.2.2.3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Jalan Usaha Tani
- 3.2.2.4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Dam Parit
- 3.2.2.5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Long Storage
- 3.2.2.6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Pintu Air
- 3.2.2.7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- 3.2.2.8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
- 3.2.2.9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3.2.3. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

- 3.2.3.1. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum

- 3.2.3.2. Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
- 3.2.3.3. Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

3.3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupandan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 3.3.1.1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- 3.3.1.2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.3.2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- 3.3.2.1. Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

3.3.3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten Kota

- 3.3.3.1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
- 3.3.3.2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3.3.4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 3.3.4.1. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- 3.3.4.2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- 3.3.4.3. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

3.3.5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

3.3.5.1. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

3.4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota

3.4.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.4.1.2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.4.1.3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

3.4.1.4. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

3.5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

3.5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.5.1.1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

3.5.1.2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

3.5.2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

- 3.5.2.1. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- 3.5.2.2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan
- 3.5.2.3. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

3.5.3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

- 3.5.3.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- 3.5.3.2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

3.6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.6.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- 3.6.1.1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 3.6.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- 3.6.1.3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- 3.6.1.4. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- 3.6.1.5. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

- 4.1.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air**

Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1.1. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

4.1.1.2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

4.1.2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

4.1.2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

4.2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

4.2.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

4.2.1.1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

4.2.1.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil

4.2.1.3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

4.2.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4.2.2.1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2.2.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota

4.2.2.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

4.3.1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

4.3.1.1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2. Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

4.3.2.1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

4.3.3. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3.3.1. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.4.1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

- 4.4.1.1. Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
- 4.4.1.2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Perumusan Rencana Program, Kegiatan serta indikasi Pendanaan ditampilkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Program, Kegiatan serta indikasi Pendanaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan / impact / outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Target Kinerja dan Target Pendanaan (Rp. Ribu)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
							2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase Pelaksanaan Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persen	100	100	14.400.000	100	14.832.000	100	15.276.960	100	15.735.268	100	60.244.228	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		X.XX.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	115.000	100	126.000	100	136.000	100	147.000	100	524.000		
		X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	15.000	1	16.000	1	16.000	1	17.000	4	64.000		
		X.XX.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	n/a	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		X.XX.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	n/a	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		X.XX.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	n/a	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		
		X.XX.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	n/a	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		X.XX.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	30.000	4	35.000	4	40.000	4	45.000	16	150.000		
		X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	30.000	2	35.000	2	40.000	2	45.000	8	150.000		
		X.XX.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	8.530.000	100	9.368.500	100	10.288.000	100	11.292.650	400	39.479.150		
		X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	73	8.200.000	73	9.020.000	73	9.922.000	73	10.910.000	73	38.052.000		
		X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	290.000	4	304.500	4	320.000	4	336.000	4	1.250.500		
		X.XX.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	20.000	1	22.000	1	24.200	1	22.600	4	88.800		
		X.XX.01.202.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	10.000	1	11.000	1	9.700	1	10.650	4	41.350		
		X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	n/a	2	10.000	2	11.000	2	12.100	2	13.400	8	46.500		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		X.XX.01 .203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	60.000	100	66.000	100	72.600	100	79.620	100	278.220		
		X.XX.01. 203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	1	10.000	1	11.000	1	12.100	1	13.000	4	46.100		
		X.XX.01. 203.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	n/a	1	20.000	1	22.000	1	24.200	1	26.620	4	92.820		
		X.XX.01. 203.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	12	15.000	12	16.500	12	18.150	12	20.000	48	69.650		
		X.XX.01. 203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	1	15.000	1	16.500	1	18.150	1	20.000	4	69.650		
		X.XX.01 .205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	Persen	n/a	100	31.000	100	37.000	100	140.000	100	36.500	100	244.500		
		X.XX.01. 205.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	n/a	n/a	n/a	2	4.000	n/a	n/a	n/a	n/a	2	4.000		
		X.XX.01. 205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	105	105.000	n/a	n/a	105	105.000			
		X.XX.01. 205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	1	10.000	1	10.500	1	11.000	1	11.500	4	43.000		
		X.XX.01. 205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	1	15.000	1	15.500	1	16.000	1	16.000	4	62.500		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		X.XX.01. 205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	n/a		6.000		7.000		8.000		9.000		30.000		
		X.XX.01 .206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	792.000	100	879.500	100	953.600	100	1.074.160	400	3.699.260		
		X.XX.01. 206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	50.000	1	55.000	1	57.000	1	60.000	4	222.000		
		X.XX.01. 206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	250.000	3	270.000	3	280.000	3	300.000	12	1.100.000		
		X.XX.01. 206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	20.000	2	25.000	2	28.000	2	30.000	8	103.000		
		X.XX.01. 206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	10.000	24	11.000	24	12.100	24	13.310	96	46.410		
		X.XX.01. 206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	108.000	2	129.000	2	148.000	2	150.000	8	535.000		
		X.XX.01. 206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	4.000	2	4.500	2	5.000	2	55000	8	68.500		
		X.XX.01. 206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	350.000	12	385.000	12	423.500	12	465.850	48	1.624.350		
		X.XX.01 .207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		100	310.000	100	341.000	100	625.100	100	318.000	100	1.594.100		
		X.XX.01. 207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	n/a	2	80.000	2	88.000	2	96.800	2	106.000	8	370.800		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		X.XX.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	n/a	5	80.000	5	88.000	5	96.800	5	106.000	20	370.800		
		X.XX.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	8	150.000	8	165.000	8	181.500	8	106.000	32	602.500		
		X.XX.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	250.000	n/a	n/a	1	250.000		
		X.XX.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.535.000	100	1.555.500	100	1.566.000	100	1.571.000	100	6.227.500		
		X.XX.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	n/a	1	5.000	1	5.500	1	6.000	1	6.000	1	22.500		
		X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	n/a	1	380.000	1	400.000	1	410.000	1	415.000	1	1.605.000		
		X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	n/a	35	1.150.000	35	1.150.000	35	1.150.000	35	1.150.000	35	4.600.000		
		X.XX.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	3.027.000	100	2.458.500	100	1.495.660	100	1.216.338	400	8.197.498		
		X.XX.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 3	35	250.000	35	300.000	35	360.000	35	432.000	140	1.342.000		
		X.XX.01.209.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	2.627.000	1	1.978.500	1	919.660	1	525.138	4	6.050.298		

RENCANA STRATEGIS | 2023
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | 2026

		X.XX.01. 209.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	70 Unit Pc, 40 Unit Printer, 50 Unit AC	180	150.000	180	180.000	180	216.000	180	259.200	720	805.200		
Meningkat nya Ketahanan Pangan Dan Pertumbu han Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan				Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	81,6	83,9		85		86,1		87,2		87,2			
	Meningkat nya Konsumsi Energi dalam mengoptim alkan Diversifika si Pangan Masyarakat			Konsumsi energi	kkal/kapita /hari	2.072	2.082		2.087		2.092		2.097		2.097			
		2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur	Persen	n/a	100	985.000	100	1.004.700	100	1.024.794	100	1.045.290	100	4.059.784	DPKPP	KOTA SINGKA WANG
		2.09.02. 201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur untuk Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	n/a	7	985.000	7	1.004.700	7	1.024.794	7	1.045.290	28	4.059.784		
		2.09.02. 2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	n/a	2	300.000	2	320.000	2	340.000	2	360.000	8	1.320.000		
		2.09.02. 2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	n/a	5	590.000	4	489.700	4	489.794	4	490.290	17	2.059.784		

RENCANA STRATEGIS | 2023
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | 2026

		2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	n/a	n/a	-	1	100.000	1	n/a	100.000	1	100.000	3	300.000		
		2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	n/a	1	15.000	1	15.000	1		15.000	1	15.000	4	60.000		
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	n/a	1	80.000	1	80.000	1		80.000	1	80.000	4	320.000		
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase konsumsi energi	persen	98,7	99,1	905.352	99,4	995.887	99,6		1.095.476	99,9	1.205.023	99,9	4.201.738	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	n/a	1	335.352	1	335.887	1		345.476	1	435.023	4	1.451.738		
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan yang tersedia	laporan	n/a	1	20.000	1	25.000	1		25.000	1	30.000	4	100.000		
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	n/a	2	60.000	2	70.000	2		80.000	2	100.000	8	310.000		
		2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	n/a	1	100.000	1	100.000	1		100.000	1	100.000	4	400.000		
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	n/a	12	15.000	12	25.000	12		15.000	12	25.000	12	80.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

	2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Usaha pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	unit	n/a	1	140.352	1	115.887	1	125.476	1	180.023	1	561.738		
	2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	Laporan	n/a	1	250.000	1	270.000	1	350.000	1	355.000	1	1.225.000		
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Ton	10	20	250.000	20	250.000	25	335.000	25	335.000	90	1.170.000		
	2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton	n/a	n/a	n/a	10	20.000	10	15.000	10	20.000	30	55.000		
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	konsumsi energi penduduk	kkal/kap/hari	2.072	2.082	320.000	2.087	390.000	2.092	400.000	2.097	415.000	2.097	1.525.000		
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	8	4	300.000	5	365.000	5	375.000	5	385.000	20	1.425.000		
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	n/a	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	4	100.000		
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah Tahan Pangan	persen	n/a	80	100.000	80	110.000	80	121.000	80	133.100	80	464.100	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksana kegiatan Penyusunan Peta dan Analisis Kerawanan Pangan	Kali	n/a	1	35.000	1	40.000	1	41.000	1	45.000	4	161.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	n/a	1	35.000	1	40.000	1	41.000	1	45.000	4	161.000		
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	Kecamatan	n/a	5	65.000	5	70.000	5	80.000	5	88.100	5	303.100		
		2.09.042.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	18.100	8	63.100		
		2.09.042.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	50.000	1	55.000	1	65.000	1	70.000	1	240.000		
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	n/a	80	3.965	85	3.987	85	3.991	85	4.015	85	15.958	DPKPP	KOTA SINGKA WANG
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pangan Segar Daerah	kali	n/a	1	3.965	1	3.987	1	3.991	1	4.015	4	15.958		
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan pangan Segar daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Dokumen	n/a	n/a	-										
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	n/a	n/a	-										
		2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	-										

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-		
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	17	1	3.965	1	3.987	1	3.991	1	4.015	4	15.958		
Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	4,34	4,42		4,46		4,5		4,54		4,54			
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Daerah				Produksi Padi	Ton	14.770,45	15.067		15.217		15.369		15.522		15.522			
				Produksi Jagung	Ton	2.466	2.565		2.616		2.668		2.721		2.721			
				Produksi Talas	Ton	1.888	1.964		2.003		2.043		2.084		2.084			
				Produksi Buah-buahan	Ton	2.899	3.016		3.076		3.137		3.200		3.200			
				Produksi Sayur-sayuran	Ton	2.201	2.289		2.335		2.382		2.430		2.430			
				Produksi Kelapa Sawit	Ton	4.978	5.226		5.488		5.762		6.050		6.050			
				Produksi Karet	Ton	4.791	5.039		5.290		5.554		5.831		5.831			
				Produksi Kelapa Dalam	Ton	1.518	1.563		1.610		1.658		1.708		1.708			
			Produksi Daging	Ton	5.205,39	5.361,55		5.522,39		5.743,28		6.030,44		6.030,44				
		3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	2.028.525	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
			Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persen	n/a	5	5	5	5	5	20	20	20			
			Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Persen	n/a	50	55	60	65	65	65	65	65			
	3.27.02.201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kali	n/a	12	76.983	12	77.407	12	77.483	12	77.952	12	309.825	
	3.27.02.201.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	n/a	12	76.983	12	77.407	12	77.483	12	77.952	12	309.825	
	3.27.02.201.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kali	n/a	12	7.000	12	7.000	12	7.000	12	8.000	48	29.000	
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Laporan	n/a	12	4.000	12	4.000	12	4.000	12	4.500	48	16.500	

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan /Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.500	48	12.500
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	12	15.000	12	15.000	12	15.000	12	15.000	48	60.000
		3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	n/a	50.000	5.000	55.000	5.000	60.000	5.000	63.000	5.000	228.000	20.000
		3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	n/a	30	5.000	35	5.000	40	5.000	45	5.000	150	20.000
		3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	n/a	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	48	20.000
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah	Persen	n/a	100	405.050	100	407.401,966	100	407.821,885	100	409.425,848	400	1.629.700
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	170	179	390.050	188	392.000	197	392.321,885	206	393.925,848	206	1.568.298
		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	n/a	13	15.000	13,7	15.401,966	14,4	15.500	15	15.500	15	61.402

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan di pelihara	Unit	5	14	2.731.739	16	2.875.575	17	3.127.504	18	3.176.879	65	11.911.698		
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	n/a	3	719.000	3	717.000	4	958.416	4	961.416	14	3.355.832		
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-										
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	n/a	5	1.177.499	4	956.323	4	956.323	5	1.200.323	18	4.290.468		
		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	1	261.000	1	258.000	1	258.000	1	261.337	4	1.038.337		
		3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-	1	258.000	1	258.000	1	261.000	3	777.000		
		3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	2	113.000	4	218.000	4	218.000	5	261.000	13	810.000		
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2	200.240,397	2	210.252,417	2	220.765,038	2	231.803,290	6	863.061,142		
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	n/a	1	261.000	1	258.000	1	258.000	n/a	-	3	777.000		
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	n/a	n/a	-										
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan umum yang diidentifikasi dan dikelola	Ha	n/a	1	8.343,350	1	8.760,517	1	9.198,543	1	9.658,470		35.961		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.03.2.04.01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha	n/a	1	4.000	1	1.000,000	1	1.200	1	1.200	4	7.400			
		3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang DiKelola	Ha	n/a	n/a	n/a	1	3.400	1	3.498,543	2	3.958,470	4	10.857			
		3.27.03.2.04.03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Laporan	n/a	12	4.343,350	12	4.360,517	12	4.500	12	4.500	12	17.704			
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/ternak	Persen	n/a	10		8		5		3		3		4.925.322	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
				Persentase Pengawasan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	Persen	n/a	70	1.195.000	70	1.218.900	70	1.243.278	70	1.268.144	70				
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kali	n/a	12	400.000	12	403.000	12	413.128	12	420.643,560	48	1.636.772			
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	n/a	12	225.000	12	228.000	12	233.128	12	235.643,560	48	921.771,560			
		3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	12	175.000	12	175.000	12	180.000	12	185.000	48	715.000			

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	12	175.000	12	180.000	12	180.000	12	185.000	48	720.000		
		3.27.04.2.02.01	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	n/a	12	175.000	12	180.000	12	180.000	12	185.000	48	720.000		
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner terlayani	Bulan	12	12	65.000	12	68.500	12	73.150	12	75.500	48	282.150		
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	n/a	12	15.000	12	16.500	12	18.150	12	18.500	48	68.150		
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	n/a	12	50.000	12	52.000	12	55.000	12	57.000	48	214.000		
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kelompok Tani/Ternak/Unit Usaha Peternakan yang terlayani	Kali	n/a	12	235.000	12	243.500	12	247.000	12	254.000	48	979.500		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	n/a	12	150.000	12	158.500	12	160.000	12	162.000	48	630.500		
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	n/a	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	55.000	48	205.000		
		3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis Yang Ditetapkan	Laporan	n/a	12	35.000	12	35.000	12	37.000	12	37.000	48	144.000		
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	RPH	2	2	320.000	2	323.900	2	330.000	2	333.000	2	1.306.900		
		3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	n/a	12	320.000	12	323.900	12	330.000	12	333.000	12	1.306.900		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	20	20		22		24		26		26				
				Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persen	n/a	80	75.000	80	75.000	80	75.000	80	75.000	80	300.000	DPKPP	KOTA SINGKAWANG	
		3.27.05.201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Ha	500	80	75.000,000	80	75.000,000	80	75.000,000	80	75.000,001	80	300.000			
				Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kecamatan		4		4		4		4		4				
		3.27.05.201.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	500	80	24.438,202	80	24.438,202	80	24.438,202	80	24.438,202	80	97.753			
		3.27.05.201.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-			
		3.27.05.201.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	n/a	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-	n/a	-			
		3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	-	12	50.561,798	12	50.561,798	12	50.561,798	12	50.561,799	12	202.247			

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pertimbangan teknis untuk Unit usaha yang diterbitkan	Persen	n/a	100	20.500	100	20.500	100	20.500	100	20.500	100	82.000	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang terfasilitasi dalam pengurusan izin	Unit Usaha	n/a	3	6.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000	3	24.000		
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha yang diawasi izin usahanya	Kali	n/a	12	8.500	12	8.500	12	8.500	12	8.500	48	34.000		
		3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan pakan yang Diawasi	Laporan	n/a	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	48	10.000		
		3.27.06.2.02.04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi izin usaha	Unit Usaha	n/a	10	6.000	10	6.000	10	6.000	10	6.000	10	24.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.27.06.2.03.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Yang memenuhi Komitmen	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	n/a	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12	3.000	48	12.000		
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	Persen	n/a	30	800.000	30	816.000	30	832.320	30	848.966	30	3.297.286	DPKPP	KOTA SINGKA WANG
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan	Kali	n/a	12	800.000	12	816.000	12	832.320	12	848.966	12	3.297.286		
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	n/a	3	150.000	3	180.000	3	210.000	3	230.000	3	770.000		
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	n/a	52	130.000	52	136.000	78	150.000	78	150.000	78	566.000		
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	n/a	3	250.000	3	220.000	3	200.000	3	204.966	3	874.966		
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	n/a	2	25.000	2	30.000	2	35.000	2	40.000	8	130.000		
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	n/a	28	245.000	28	250.000	28	237.320	28	224.000	28	956.320		

RENCANA STRATEGIS | 2023
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | 2026

Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	4,34	4,42		4,46		4,5		4,54		4,54			
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Daerah				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.450,60	4.630,4		4.723		4.817,5		4.913,8		4.913,8			
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.973	2.147,9		2.190,9		2.234,7		2.279,4		2.279,4			
		3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	5	2	5.853.510	2	5.912.046	2	5.971.166	2,5	6.030.878	2,5	20.847.600		
		3.25.03.2.01	Pengeolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di perairan Umum	Ton	75	82	2.443.510	85	2.377.000	86	2.610.000	88	3.010.000	88	7.520.510		
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	Unit	n/a	15	1.743.510	18	1.657.000	21	1.870.000	25	2.250.000	79	7.520.510		
		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	n/a	10	700.000	10	720.000	10	740.000	10	760.000	40	2.920.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Kali	n/a	40	3.410.000	45	3.535.046	47	3.361.166	50	3.020.878	50	13.327.090		
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	130	70	3.395.000	95	3.512.546	110	3.338.666	140	2.998.378	415	13.244.590		
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Kelembagaannya	Kelompok	n/a	2	15.000	3	22.500	3	22.500	3	22.500	11	82.500		
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	10	2	78.615	2	79.048	2	79.125	2	79.605	2	316.393	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan Kecil yang difasilitasi	Kelompok	10	10	17.500	10	17.500	15	17.500	15	17.500	15	70.000		
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	n/a	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	20	20.000		
		3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	10	5	7.500	5	7.500	5	7.500	5	7.500	20	30.000		
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	10	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	20	20.000		
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana dan Sarana yang disediakan	Unit	n/a	15	61.115	17	61.548	18	61.625	18	62.105	68	246.393		
		3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	n/a	1	7.200	1	7.200	1	7.200	1	7.200	4	28.800		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	11	38.915	12	36.232	12	36.284	12	36.604	47	148.035		
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	4	15.000	5	18.116	6	18.141	6	18.301	21	69.558		
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha Skala kecil yang dibina	Persen	n/a	80	20.887	80	21.002	80	21.022	80	21.150	80	84.061	DPKPP	KOTA SINGKAWANG
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha pengolahan hasil perikanan dibantu	Unit usaha	n/a	2	7.200	3	7.200	4	7.200	5	7.200	14	28.800		
		3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	n/a	1	7.200	1	7.200	1	7.200	1	7.200	4	28.800		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Kegiatan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Kali	n/a	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	16	20.000		
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan	Unit usaha	n/a	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	5.000	20	20.000		

RENCANA STRATEGIS **2023**
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN **2026**

		3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pengolah Hasil Perikanan yang difasilitasi	Pelaku usaha	4	1	8.687	1	8.802	1	8.822	1	8.950	4	35.261			
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Pelaku usaha	4	1	8.687	1	8.802	1	8.822	1	8.950	4	35.261			
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan perairan umum yang terawasi	Persen	n/a	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	75.000	3	300.000	DPKPP	KOTA SINGKAWANG	
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kali	n/a	6	75.000	6	75.000	6	75.000	6	75.000	24	300.000			
		3.25.05.2.01.01	Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	200.000			
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	100.000			
TOTAL									27.861.945		28.658.215		29.483.639		30.345.854				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk tahun 2023-2026. Gambaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	81,6	83,9	85,0	86,1	87,2	87,2
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	4,34	4,42	4.46	4,50	4,54	4,54
3	Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.072	2.082	2.087	2.092	2.097	2.097
4	Produksi Padi (ton)	14.770,45	15.067	15.217	15.369	15.522	15.522
5	Produksi Jagung (ton)	2.466	2.565	2.616	2.668	2.721	2.721
6	Produksi Talas (ton)	1.888	1.964	2.003	2.043	2.084	2.084
7	Produksi Buah-Buahan (ton)	2.899	3.016	3.076	3.137	3.200	3.200
8	Produkki Sayuran (ton)	2.201	2.289	2.335	2.382	2.430	2.430
9	Produkki Kelapa Sawit (ton)	4.978	5.226	5.488	5.762	6.050	6.050
10	Produksi Karet	4 .791	5.039	5.290	5.554	5.831	5.831

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
	(ton)						
11	Produksi Kelapa Dalam (ton)	1.518	1.563	1.610	1.658	1.708	1.708
12	Produksi Daging (ton)	5.205,39	5.361,55	5.522,39	5.743,28	6.030,44	6.030,44
13	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.450,6	4.630,4	4.723	4.817,5	4.913,8	4.913,8
14	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.973	2.147,9	2.190,9	2.234,7	2.279,4	2.279,4
15	Persentase Penyediaan Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase konsumsi energi	98,7%	99,1%	99,4%	99,6%	99,9%	99,9%
17	Persentase daerah Tahan Pangan	n/a	80%	80%	80%	80%	80%
18	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	n/a	80%	85%	85%	85%	85%
19	Persentase pengawasan Penggunaan sarana pertanian	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	n/a	5%	5%	5%	5%	20%
21	Persentase Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	n/a	50%	55%	60%	65%	65%
22	Tersusunnya	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
	Masterplan pengembangan Lahan Pertanian dan prasarana Pertanian						
23	Persentase Ketersediaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeiharaan Prasarana Pertanian	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
24	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase Kecamatan pengembangan lahan penggembalaan umum	n/a	20%	20%	20%	20%	20%
26	Persentase Penurunan Penyakit Hewan/ternak	n/a	10%	8%	5%	3%	3%
27	Persentase Pengawasan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh Halal	n/a	70%	70%	70%	70%	70%
28	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	20%	20%	22%	24%	26%	26%
29	Persentase Pengendalian	n/a	80%	80%	80%	80%	80%

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN

2023
2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Kondisi Awal (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
	dan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis						
30	Persentase pertimbangan teknis untuk Unit usaha yang diterbitkan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	n/a	30%	30%	30%	30%	30%
32	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5%	2%	2%	2%	2,5%	2,5%
33	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10%	2%	2%	2%	2%	2%
34	Persentase Pelaku Usaha Skala kecil yang dibina	n/a	80%	80%	80%	80%	80%
35	Persentase Kawasan perairan umum yang terawasi	n/a	3%	3%	3%	3%	3%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang berorientasi pada optimalisasi dan pengembangan potensi di bidang pangan, pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang.

Renstra ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang tahun 2023-2026 sebagai arah dan pedoman Unit Kerja Lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang yang secara normative telah diupayakan memuat Program dan Rencana Kerja.

Demikian Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun, dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.